

**KAPASITAS KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT KALURAHAN CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN**

Silas Marbi¹, Tri Nugroho Emanuel Widayat²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta^{1,2}

e-mail: silasmereya349@gmail.com¹, trinugroho822@gmail.com²

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi lokal, membangun partisipasi warga, dan mewujudkan kemandirian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Kepala Kalurahan Condongcatur dalam memberdayakan masyarakat, baik dari aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan lokal yang semakin kompleks, terutama di wilayah urban seperti Condongcatur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kalurahan Condongcatur memiliki kapasitas yang cukup baik dalam mendorong program pemberdayaan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal keberlanjutan program dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penguatan kapasitas kepemimpinan desa ke depan.

Kata Kunci: *Kapasitas Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Kalurahan Condongcatur*

ABSTRACT

Community empowerment is a key pillar of sustainable village development. The village head, as the highest leader at the village level, plays a strategic role in mobilizing local potential, fostering citizen participation, and achieving community independence. This study aims to analyze the capacity of the Head of Condongcatur Village in empowering the community, focusing on aspects of leadership, decision-making, communication, and collaboration with various stakeholders. The research background stems from the urgency of synergy between village government and community to address increasingly complex local development challenges, especially in urbanized areas like Condongcatur. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the Head of Condongcatur Village has demonstrated considerable capacity in promoting empowerment programs, although challenges remain in terms of program sustainability and broader community involvement. These findings are expected to contribute to strengthening village leadership capacity in the future.

Keywords: *Village Head Capacity, Community Empowerment, Participation, Condongcatur Village*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam menggerakkan potensi sumber daya yang ada di desa. Kapasitas

kepala desa dalam mengelola pemerintahan, mengoordinasikan program pembangunan, serta memberdayakan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepala desa dan aparturnya merupakan salah satu agenda pemerintah dalam mendukung pembangunan desa.

Salah satu kapasitas kepala desa yang perlu dioptimalkan adalah kapasitas dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal, serta menciptakan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar (Almasri dan Deswimar, 2014).

Sampai saat ini, disparitas kemiskinan antara daerah perkotaan dan perdesaan masih lebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2023 sebagaimana dikutip oleh Kompas (2024), tingkat kemiskinan di daerah perkotaan sudah mencapai 7,29 persen atau 11,74 juta orang. Sementara di daerah perdesaan masih 12,22 persen atau 14,16 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di perdesaan masih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kepala desa dengan kapasitas yang optimal dalam memberdayakan masyarakat desa. Prinsip *local self-governance* menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan otonom dalam merumuskan serta melaksanakan peraturan desa (Rosyadi et al., 2008). Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan (Arifin, 2018), terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang berorientasi pada kepentingan rakyat perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai model pemberdayaan (Kumolo, 2017), yang bertujuan untuk mendukung kelompok rentan dalam komunitas (Syafingi et al., 2018). Upaya pemberdayaan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan desa yang digerakkan oleh masyarakat sendiri guna meningkatkan kesejahteraan mereka (Rumlus et al., 2017). Dengan demikian, peran perangkat desa menjadi sangat penting dalam memastikan efektivitas pemberdayaan masyarakat (Nawawi, 2019). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya (Saleh, 2022).

Berbagai permasalahan menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pemberdayaan masih lemah, baik dari aspek tingkat pendidikan, partisipasi dalam pelatihan, maupun pengalaman kerja mereka (Arsjad, 2018). Kondisi ini menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan desa (Nawawi et al., 2022). Keterbatasan kepala desa dalam melaksanakan program pemberdayaan juga berdampak pada stagnasi perkembangan desa (Diwangga, 2021). Dengan kata lain, kepala desa kurang mampu berinovasi dan gagal menciptakan terobosan dalam pembangunan desa, yang berakibat pada lambatnya kemajuan desa. Nawawi (2022) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika didukung oleh prinsip-prinsip yang membangun kepercayaan, seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, keadilan, serta akuntabilitas. Oleh karena itu, berbagai pihak perlu didorong untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam aspek administrasi, manajerial, dan pelayanan melalui program pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemajuan dalam upaya pemberdayaan, yang pada akhirnya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan merasakan manfaatnya, masyarakat akan lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan di desa.

Kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Namun, dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya keterampilan kepemimpinan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran yang dapat menghambat efektivitas program pemberdayaan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana kapasitas kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program ini menjadi penting untuk diteliti. Meskipun terdapat berbagai program yang telah dijalankan, tantangan dalam pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Condongcatur tetap ada. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurangnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Selain itu, perkembangan pesat di Kalurahan Condongcatur juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan akan layanan publik yang lebih baik dan strategi pemberdayaan yang lebih efektif. Oleh karena itu, kepala desa dituntut untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola berbagai tantangan ini guna memastikan keberlanjutan pembangunan desa. Berdasarkan kondisi tersebut maka menarik kiranya untuk membahas secara lebih mendalam mengenai “Kapasitas Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif untuk menganalisis secara mendalam kapasitas Kepala Kalurahan Condongcatur, Sleman, dalam memberdayakan masyarakat. Subjek penelitian atau informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan data yang diperoleh kaya dan relevan dengan fokus penelitian. Informan kunci adalah Kepala Kalurahan Condongcatur. Untuk mendapatkan perspektif yang seimbang dan komprehensif, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yang terdiri dari aparatur kalurahan, pimpinan lembaga kemasyarakatan desa (LKD), serta perwakilan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok warga yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan. Pemilihan informan dari berbagai unsur ini bertujuan untuk melakukan triangulasi sumber data.

Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam semi-terstruktur dilaksanakan dengan seluruh informan untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka mengenai gaya kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan strategi komunikasi kepala kalurahan, dengan instrumen berupa panduan wawancara. Selain itu, dilakukan observasi non-partisipan pada kegiatan-kegiatan strategis seperti musyawarah desa dan rapat koordinasi untuk mengamati secara langsung praktik kepemimpinan. Teknik dokumentasi juga digunakan dengan menelaah dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), laporan kegiatan pemberdayaan, dan notulensi rapat untuk memverifikasi data serta memahami konteks kebijakan.

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini diawali dengan merangkum dan mengkodekan informasi penting dari transkrip wawancara dan catatan lapangan berdasarkan dimensi kapasitas kepemimpinan, seperti komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif atau matriks untuk

memetakan pola-pola temuan. Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan konsistensi data antar-sumber (kepala kalurahan, aparat, dan masyarakat) dan antar-metode (wawancara, observasi, dan dokumen), sehingga kesimpulan yang ditarik bersifat kredibel dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Pemahaman kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Kapasitas kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tercermin dari pemahaman kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Pemahaman tersebut mencakup pemahaman kepala desa pada tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku masyarakat menuju perilaku sadar dan peduli sehingga masyarakat merasa bahwa dirinya membutuhkan kapasitas diri untuk berkembang. Terkait dengan hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa di Kalurahan Condongcatur telah menyadari pentingnya membangun kesadaran masyarakat secara perlahan dan konsisten. Penyadaran ini dilakukan dengan menyelenggarakan forum warga secara rutin, seperti rembug kampung, pengajian warga, dan forum dialog bersama lurah. Kepala Desa juga berupaya menyisipkan nilai-nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Kemudian Kepala Desa juga menggerakkan komunitas lokal seperti karang taruna, kelompok lansia, dan ibu-ibu PKK agar menjadi agen perubahan. Kepala Desa juga mendorong warga menyadari bahwa kemajuan wilayah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri. Hal ini tercermin dari penjelasan Kepala Desa dalam petikan wawancara berikut ini:

“Sebagai kepala desa, saya menyadari pentingnya membangun kesadaran masyarakat secara perlahan dan konsisten. Penyadaran ini kami lakukan dengan menyelenggarakan forum warga secara rutin, seperti rembug kampung, pengajian warga, dan forum dialog bersama lurah. Saya juga berupaya menyisipkan nilai-nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Kemudian saya juga menggerakkan komunitas lokal seperti karang taruna, kelompok lansia, dan ibu-ibu PKK agar menjadi agen perubahan. Saya juga mendorong warga menyadari bahwa kemajuan wilayah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri.” (Wawancara, 17 April 2025). Beragam kegiatan masyarakat di Kalurahan Condongcatur memang berjalan lancar, seperti kegiatan karang taruna. Karang taruna Bhakti Loka memiliki susunan pengurus yaitu pelindung, dan pembina, Majelis Pertimbangan Karang Taruna, dan Pengurus Harian.

Pada Tahun Anggaran 2023, Kalurahan Condongcatur memperoleh transfer Dana Desa sebesar Rp 1.919.468.000,00. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi untuk pembangunan fisik meliputi: perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan di 15 titik lokasi, pembangunan sistem drainase di 6 lokasi, pembangunan fasilitas olahraga dan balai pertemuan sebanyak 5 unit, pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih) di 3 titik, serta pembangunan satu unit sarana prasarana umum.

Sementara itu, alokasi untuk sektor nonfisik mencakup: operasional pemerintahan kalurahan, pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan posyandu di 40 lokasi, penyediaan bibit ikan untuk 6 kelompok masyarakat, pelatihan budidaya jamur dan lele, serta distribusi bibit lele dan media tanam jamur bagi 18 Kelompok Wanita Tani (KWT). Selain itu, terdapat pula pemberian bantuan stimulan kepada 7 kelompok tani (Gapoktan), dukungan

terhadap 2 kelompok peternak, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi 54 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi (Sumber: Profil Kalurahan Condongcatur, 2024).

Kemampuan lurah dalam meningkatkan pemberdayaan warga juga dapat dilihat dari upaya pada aspek peningkatan kapasitas intelektual masyarakat. Lurah menunjukkan pemahaman bahwa kecerdasan dan kemandirian warga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, ia mendorong masyarakat untuk berinovasi melalui penyediaan dana insentif inovasi pedukuhan serta menyelenggarakan lomba kampung inovatif. Selain itu, Kalurahan Condongcatur juga mengembangkan program Desa Wisata "Green Kayen", yang mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan wisata berbasis budaya dan lingkungan. Program ini diperkuat melalui pendirian "Forum Inovasi Kalurahan", sebuah wadah bagi warga untuk menyampaikan dan mengembangkan ide-ide kreatif secara kolektif. Salah satu terobosan konkret yang digagas oleh pemerintah kalurahan adalah pengembangan destinasi wisata rintisan yang terletak di bagian barat Kapanewon Depok. Destinasi ini dikenal dengan nama "Green Kayen", yang menyuguhkan kombinasi unik antara keindahan hutan sungai, warisan budaya, serta kerajinan dan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat setempat. Inisiatif ini mendapatkan pengakuan resmi melalui SK Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Nomor: 556/18/Kep.Ka.Dinas Pariwisata 2020. Green Kayen memanfaatkan lahan sempadan Kali Boyong seluas sekitar 0,7 hektar yang berstatus sebagai Tanah Kas Desa (TKD).

Dukungan kepala desa dalam pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat juga tercermin dalam kolaborasi dengan sektor swasta dan pendidikan tinggi. Pemerintah Kalurahan Condongcatur menjalin kerja sama dengan Ruang 412 Business Incubator melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 2 Februari 2023, bertempat di Ruang 412 (Warung Mbah Sambat), Pandeansari, Gandok Condongcatur. Ruang 412 adalah inkubator bisnis yang bergerak dalam pengembangan komunitas dan kolaborasi, serta fokus pada penciptaan ekosistem bisnis UMKM. Kolaborasi ini juga melibatkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai mitra dalam pelaksanaan program inkubasi UMKM di wilayah Condongcatur.

b. Keterampilan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Keterampilan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tercermin dari tahap penyadaran, yakni keterampilan kepala desa pada tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku masyarakat menuju perilaku sadar dan peduli sehingga masyarakat merasa bahwa dirinya membutuhkan kapasitas diri untuk berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan kepala desa di Kalurahan Condongcatur mencakup komunikasi, kolaborasi, serta kemampuan manajerial dan teknis, yang diimplementasikan dalam bentuk menjadi fasilitator yang terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat serta mampu menyusun program berdasarkan pemetaan potensi dan masalah nyata, bukan hanya berdasarkan asumsi. Hal ini tercermin dari penjelasan Kepala Desa dalam petikan wawancara berikut ini:

"Keterampilan saya tentunya mencakup juga keterampilan komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat tentunya, lalu keterampilan kolaborasi, serta kemampuan manajerial dan teknis, yang kami implementasikan dalam bentuk menjadi fasilitator yang terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya juga mampu menyusun program berdasarkan pemetaan potensi dan masalah nyata, bukan hanya berdasarkan asumsi. Jadi nggak hanya kira-kira, tetapi didukung data lapangan, berdasarkan pada yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini." (Wawancara, 17 April 2025)

Lurah Kalurahan Condongcatur menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan warga. Komitmen ini diwujudkan melalui keberadaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) yang aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan partisipatif. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Penjaringan Aspirasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berlangsung pada Selasa, 23 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat seperti BPKal, LPMKal, PKK, Karang Taruna, kader Posyandu, penyelenggara PAUD, Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, serta perwakilan RW, RT, dan organisasi masyarakat lainnya yang ada di Condongcatur.

Dalam pelaksanaannya, BPKal juga mengundang Pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk berkoordinasi mengenai program pembangunan dan administrasinya. Mereka bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan fisik di lokasi seperti Pendopo Kalurahan dan kawasan Green Kayen, guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan rencana administrasi. Bertempat di Ruang Wacana Loka Condongcatur, BPKal juga menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (MUSKAL) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024 pada Rabu, 21 Juni 2023.

Aktivitas kelompok masyarakat, seperti PKK, juga berjalan dengan baik di Kalurahan Condongcatur. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang lahir dari dan untuk masyarakat, menjadikan perempuan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan keluarga yang mandiri, bahagia, dan sejahtera. Salah satu fokus penting adalah penguatan kapasitas sumber daya kader agar mampu menjalankan peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali gerakan PKK secara profesional. Program kerja Pokja 1 PKK Kalurahan Condongcatur, misalnya, melibatkan lansia dalam kegiatan ekonomi produktif. Lansia dari Padukuhan Ngropoh mengolah tanaman lidah buaya yang ditanam sendiri menjadi beragam produk seperti minuman, manisan, dan teh herbal. Selain itu, Pokja 1 juga mendampingi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) RW 18 dalam kegiatan pembinaan Keluarga Ramah Anak. Sementara itu, Pokja 2 fokus pada bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan koperasi. Pokja ini menggagas berbagai pelatihan kreatif yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi kader, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi usaha produktif.

Kemampuan kepala desa dalam proses pemberdayaan juga tercermin dari keberhasilannya dalam tahap transformasi kemampuan warga. Transformasi ini mencakup perluasan wawasan dan peningkatan keterampilan dasar, sehingga masyarakat mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan ini meliputi penguatan jejaring kerja baik secara vertikal dengan pemerintah dan perguruan tinggi, maupun horizontal antarkalurahan dan antarkomunitas, untuk mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan. Kepala Kalurahan Condongcatur juga memperlihatkan keahlian dalam hal komunikasi, fasilitasi, dan manajemen. Hal ini tercermin dari pengelolaan program seperti Perpustakaan Loka, pelaksanaan forum Jagongan Kalurahan, serta penyediaan informasi publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Kemampuan dalam pemberdayaan dan organisasi juga tampak pada program-program seperti KPSM, pengembangan Desa Wisata Green Kayen, serta pembinaan terhadap organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Program-program ini memberi warga akses keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan partisipatif dan berbasis pada potensi lokal memungkinkan masyarakat berperan lebih aktif, meskipun tantangan seperti pelayanan administrasi dan akses yang merata masih perlu dibenahi.

Kepemimpinan lurah yang bersifat kolaboratif dan memiliki visi strategis turut mendorong lahirnya masyarakat yang cakap, terbuka wawasannya, serta siap terlibat dalam

proses pembangunan daerah. Komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan menjalin kerja sama bersama lembaga pendidikan tinggi di sekitar wilayahnya. Sebagai contoh, pada Kamis, 14 September 2023, Pemerintah Kalurahan Condongcatur melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoA) bersama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta. Perjanjian tersebut meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dan ditandatangani oleh Lurah Condongcatur dan Ketua Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD”.

c. Kemampuan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Kemampuan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tercermin dari tahap penyadaran, yakni kemampuan kepala desa pada tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku masyarakat menuju perilaku sadar dan peduli sehingga masyarakat merasa bahwa dirinya membutuhkan kapasitas diri untuk berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kepala desa diuji dalam memimpin, mengelola konflik, memfasilitasi perubahan, dan mengelola SDM desa. Hal ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara menyusun RPJMKal dan RKP secara partisipatif, menggunakan data berbasis SI Kalurahan untuk menentukan program prioritas, serta memonitor dan mengevaluasi program secara berkala, termasuk mengundang tokoh masyarakat untuk memberikan umpan balik. Hal ini tercermin dari penjelasan Kepala Desa dalam petikan wawancara berikut ini:

“Kemampuan saya selaku kepala desa diuji dalam memimpin, mengelola konflik, memfasilitasi perubahan, dan mengelola SDM desa. Ini jadi tantangan saya juga ya mengingat misalnya saja untuk SDM saja ini beragam ya, beragam usia, pendidikan, keterampilan, dan lain-lain. Kami melakukan pengelolaan semua ini dengan cara menyusun RPJMKal dan RKP secara partisipatif, lalu menggunakan data berbasis SI Kalurahan untuk menentukan program prioritas, serta memonitor dan mengevaluasi program secara berkala, termasuk mengundang tokoh masyarakat untuk memberikan umpan balik.” (Wawancara, 17 April 2025)

Kemampuan lurah dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Condongcatur juga tercermin dari upaya peningkatan kapasitas intelektual masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui upaya sistematis dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga, sehingga mampu mendorong munculnya inisiatif serta inovasi yang mengarah pada kemandirian sosial-ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lurah Condongcatur memiliki kapasitas yang signifikan dalam hal ini, yang diwujudkan melalui kemampuan memfasilitasi, berkomunikasi secara efektif, dan mengelola program dengan baik.

Kegiatan seperti pengelolaan Perpustakaan Loka, forum diskusi publik “Jagongan Kalurahan”, serta kemitraan aktif dengan institusi pendidikan tinggi menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, program-program pemberdayaan seperti KPSM, pengembangan Desa Wisata Green Kayen, serta penguatan organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna turut berkontribusi dalam menciptakan inovasi-inovasi lokal, termasuk pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan sampah secara mandiri. Strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal ini telah mendorong warga untuk lebih mandiri, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Lebih lanjut, upaya peningkatan kapasitas intelektual juga dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, khususnya dengan perguruan tinggi. Sebagai contoh, Pemerintah Kalurahan Condongcatur menyambut positif pelaksanaan program International Community Services yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Kegiatan ini terlaksana pada Senin, 1 Mei 2023, melalui kunjungan dan studi lapangan dari Universitas Teknologi Mara (UiTM) Malaysia, Universitas Islam Indonesia (UII), dan STIE YKPN Yogyakarta. Program ini

merupakan bentuk kolaborasi antara Kalurahan Condongcatur dan ketiga perguruan tinggi, yang difokuskan pada kegiatan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan bagi pelaku UMKM lokal dalam rangka memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.



Gambar 1. Dokumentasi hasil wawancara dengan pihak kalurahan

Pembahasan

Analisis terhadap peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Kalurahan Condongcatur menyajikan sebuah model kepemimpinan yang holistik dan multi-dimensi. Jauh dari sekadar menjalankan fungsi administratif, kepala desa secara aktif berperan sebagai fasilitator, inovator, dan kolaborator yang ulung. Keberhasilan pemberdayaan di wilayah ini tidak bertumpu pada satu program tunggal, melainkan pada sebuah ekosistem yang dibangun secara sistematis, dimulai dari fondasi penyadaran kolektif, pengelolaan sumber daya yang strategis, hingga penciptaan budaya inovasi yang didukung oleh kemitraan lintas sektor. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana pemahaman mendalam sang pemimpin terhadap kebutuhan warganya, dipadukan dengan keterampilan manajerial dan komunikasi yang efektif, berhasil mentransformasi masyarakat dari objek pembangunan menjadi subjek yang aktif dan berdaya dalam menentukan arah kemajuan wilayahnya sendiri (Deswita & Jamilus, 2023; Macella, 2020).

Fondasi utama dari strategi pemberdayaan di Condongcatur adalah upaya penyadaran dan pembentukan perilaku. Kepala desa menunjukkan pemahaman yang matang bahwa pemberdayaan sejati tidak dapat dipaksakan dari atas, melainkan harus tumbuh dari kesadaran internal masyarakat itu sendiri. Alih-alih meluncurkan program secara sepihak, langkah awal yang diambil adalah membangun ruang-ruang dialog yang konsisten melalui forum seperti rembug kampung dan pengajian warga. Pendekatan ini secara perlahan menanamkan nilai kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif. Dengan menggerakkan komunitas yang sudah ada seperti Karang Taruna dan PKK sebagai agen perubahan, kepala desa secara cerdas mendesentralisasikan proses penyadaran, sehingga pesan bahwa kemajuan adalah milik bersama dapat tersampaikan secara lebih efektif dan mengakar kuat di tengah masyarakat (Ardiyasa & Rahayu, 2022; Baru et al., 2019; Hakim et al., 2022).

Kemampuan manajerial kepala desa teruji dan terbukti melalui alokasi Dana Desa yang strategis dan seimbang. Dengan dana lebih dari 1,9 miliar rupiah, pemerintah kalurahan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik yang terlihat, seperti perbaikan jalan dan drainase, tetapi juga memberikan porsi yang signifikan untuk program nonfisik yang menyentuh langsung kapasitas manusia. Investasi pada program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan budidaya untuk Kelompok Wanita Tani (KWT), dukungan untuk kelompok tani dan peternak, serta

penyelenggaraan 40 titik posyandu menunjukkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Keseimbangan antara pembangunan infrastruktur keras dan penguatan modal sosial-ekonomi ini mencerminkan sebuah perencanaan yang matang, di mana kemajuan fisik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian warganya (Anita, 2020; Satoto et al., 2024).

Kepemimpinan di Condongcatur tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menumbuhkan budaya inovasi. Inisiatif seperti penyelenggaraan lomba kampung inovatif dan penyediaan dana insentif merupakan stimulus yang efektif untuk memancing kreativitas warga. Puncak dari visi inovatif ini adalah pengembangan Desa Wisata "Green Kayen", sebuah proyek yang secara brilian mentransformasi lahan sempadan sungai menjadi aset ekonomi dan ekologis yang produktif. Proyek ini menunjukkan kemampuan kepala desa untuk melihat potensi tersembunyi, memobilisasi partisipasi masyarakat, dan melembagakannya hingga mendapatkan pengakuan resmi dari dinas terkait. Dengan menciptakan wadah seperti "Forum Inovasi Kalurahan", kepemimpinan ini secara sistematis membangun sebuah ekosistem di mana ide-ide dari bawah didorong untuk tumbuh dan berkembang.

Salah satu pilar kekuatan pemberdayaan di Condongcatur adalah kelihaian kepala desa dalam membangun jejaring kerja dan kemitraan strategis. Menyadari bahwa pemerintah kalurahan tidak dapat bekerja sendiri, jalinan kolaborasi aktif dibangun dengan berbagai pihak. Kemitraan dengan sektor swasta melalui inkubator bisnis dan dengan institusi pendidikan tinggi seperti UII dan STPM "APMD" menjadi akselerator utama bagi peningkatan kapasitas intelektual dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM. Kemampuan untuk membuka diri dan menjalin kerja sama lintas sektor ini mengubah kalurahan dari sebuah unit administrasi yang terisolasi menjadi sebuah simpul yang dinamis dalam jaringan pengetahuan dan sumber daya yang lebih luas, sehingga melipatgandakan dampak dari setiap program yang dijalankan (Maab et al., 2018).

Model kepemimpinan yang diterapkan sangat menekankan pada aspek partisipatif dan penyerapan aspirasi. Kepala desa secara terampil menggunakan mekanisme formal dan informal untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berasal dari bawah (*bottom-up*). Keterlibatan aktif Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dalam menyelenggarakan musyawarah dan penjaringan aspirasi menjadi bukti adanya saluran demokrasi yang sehat. Hal ini diperkuat dengan adanya forum "Jagongan Kalurahan" yang lebih cair dan informal. Kemampuan untuk mendengarkan, memfasilitasi, dan kemudian menerjemahkan aspirasi warga ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang didukung oleh data, menunjukkan sebuah gaya kepemimpinan yang melayani. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki yang kuat dari masyarakat (Baru et al., 2019; Kurniawan, 2020; Suyanto & Pudjianto, 2015).

Secara keseluruhan, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dicapai di Kalurahan Condongcatur dapat dilihat sebagai cerminan nyata dari sebuah model kepemimpinan fasilitatif yang diterapkan secara efektif. Kepala desa dalam konteks ini tidak memposisikan dirinya sebagai seorang penguasa tunggal yang menentukan segala arah kebijakan, melainkan bertindak sebagai seorang orkestrator yang mahir. Perannya adalah mengidentifikasi, mengoordinasikan, dan menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia maupun alam yang ada di wilayahnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memadukan keterampilan komunikasi yang penuh empati untuk menyerap aspirasi warga, kemampuan manajerial yang strategis dalam merancang program, serta visi inovatif yang berorientasi ke masa depan, ia berhasil menciptakan sebuah ekosistem partisipatif. Lingkungan inilah yang mendorong warga untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan di wilayah mereka.

Model kepemimpinan yang ditunjukkan di Condongcatur ini pada akhirnya menawarkan sebuah cetak biru yang sangat berharga dan dapat direplikasi oleh pemerintahan desa lainnya di seluruh Indonesia. Keberhasilannya membuktikan bahwa investasi terbesar dan paling efektif dalam pembangunan desa bukanlah semata-mata pada infrastruktur fisik, melainkan pada manusianya. Dengan secara konsisten menerapkan kolaborasi dan memberikan kepercayaan kepada warganya, pemimpin berhasil menciptakan sebuah siklus pemberdayaan yang berkelanjutan dan mandiri. Siklus ini mengubah pola pikir warga dari objek pembangunan menjadi subjek atau arsitek utama bagi masa depan mereka sendiri. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa ketika warga diberdayakan, mereka memiliki kapasitas luar biasa untuk menciptakan solusi inovatif dan membangun kemajuan yang sesungguhnya dari tingkat akar rumput.

KESIMPULAN

Kepala desa di Kalurahan Condongcatur menunjukkan kapasitas kuat dalam memberdayakan masyarakat melalui pemahaman dan keterampilan pada tahap penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual. Pemahaman tercermin dari penyadaran melalui forum warga, pergerakan kelompok seperti PKK dan karang taruna, serta program seperti Perpustakaan Loka, KPSM, dan Desa Wisata Green Kayen, yang membuka wawasan dan membangun keterampilan masyarakat. Keterampilan kepala desa meliputi komunikasi, fasilitasi, dan manajerial dalam mengelola forum seperti Jagongan Kalurahan, kolaborasi dengan universitas (UII, UNY, STMD APMD), dan program inovatif seperti inkubasi UMKM dan TANJIRO untuk pengelolaan sampah. Kemampuan ini mendorong inisiatif, inovasi, dan kemandirian masyarakat melalui ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya mandiri. Namun, tantangan seperti birokrasi rumit, pelayanan kurang ramah, dan akses terbatas bagi kelompok marjinal perlu diatasi untuk memaksimalkan pemberdayaan.

Faktor pendukung kapasitas kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman meliputi: SDM berpendidikan tinggi dan terbuka terhadap perubahan, infrastruktur wilayah yang baik (jalan, internet, fasilitas publik), serta keaktifan Bumkal Nyawiji dalam mengelola unit usaha (Petrashop, Klinik Nyawiji, Green Kayen). Keterampilan kepala desa juga didukung oleh kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku usaha, kondisi sosial yang harmonis dan aktif, serta pemanfaatan teknologi informasi (YouTube Gandok Village, Pasarkolombo.id). faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Sleman, kolaborasi dengan UII, UNY, dan studi tiru PKK Bangka, anggaran desa, partisipasi komunitas (PKK, karang taruna, Jagongan Kalurahan), potensi lokal, transparansi APBKal 2025, budaya gotong royong, antusiasme masyarakat dalam acara, dan pelatihan e-commerce yang memperkuat inisiatif, inovasi, dan kemandirian masyarakat. Faktor penghambat kapasitas kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman meliputi: sikap pasif sebagian warga, kurangnya tenaga pendamping profesional, dan kesenjangan literasi digital antara generasi tua dan muda. Keterampilan kepala desa juga terhambat oleh faktor sosial-ekonomi warga yang fokus pada kebutuhan dasar dan keterbatasan waktu akibat kerja informal pada tahap penyadaran dan transformasi, serta koordinasi antar lembaga yang kurang sinkron. Kemampuan kepala desa juga terhambat oleh perbedaan regulasi desa-kelurahan, keterbatasan anggaran untuk menjangkau semua warga, dan kurangnya evaluasi dampak program seperti KPSM dan Desa Wisata Green Kayen, yang memperlambat inisiatif, inovasi, dan kemandirian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasri, & Deswimar, D. (2014). Peran program pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.
- Anita, D. (2020). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pembangunan pedesaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 4(2), 29. <https://doi.org/10.36057/jips.v4i2.409>
- Antara. (2023, November 30). *Kemendagri target tingkatan kapasitas 130.000 aparatur desa*. <https://www.antaraneews.com/berita/3851220/kemendagri-target-tingkatan-kapasitas-130000-aparatur-desa>
- Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (2022). Implementasi kebijakan smart kampung di Kabupaten Banyuwangi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 712. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2863>
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan anggaran pembangunan desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16–32.
- Baru, V. P., et al. (2019). Tahap pengembangan smart kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoeearth*, 4(2), 68. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1000>
- Deswita, E., & Jamilus, J. (2023). Model kepemimpinan transformasional Nabi Muhammad SAW. *Anwarul*, 3(3), 508. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1170>
- Diwangga, D. G. (2021). *Pengembangan potensi desa oleh pemerintah desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. E-Jurnal Inskripsi. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/862>
- Hakim, A., et al. (2022). Dampak implementasi program smart kampung di Kabupaten Banyuwangi. *Oeconomicus: Journal of Economics*, 6(2), 128. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.128-139>
- Kompas. (2024, Januari 5). *Kemiskinan perdesaan*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/04/kemiskinan-perdesaan>
- Kumolo, T. (2017). *Nawa Cita untuk kesejahteraan rakyat Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara.
- Kurniawan, B. (2020). Evaluasi program konservasi cagar budaya melalui mekanisme pemberian subsidi di kawasan Kota Lama Sawahlunto. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 14(1), 38. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v14i1.200>
- Maab, M. H., et al. (2018). Rethinking model bisnis pemerintah desa: Kasus pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas, Indonesia. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 93. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.754>
- Macella, A. D. R. (2020). Regional innovation: Regional leadership in empowering the Aceh community during the Covid-19 pandemic. *IAPA Proceedings Conference*, 449. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.421>
- Media Indonesia. (2024, Juni 11). *Pemerintah tingkatan kapasitas aparatur desa lewat program P3PD*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/704974/pemerintah-tingkatan-kapasitas-aparatur-desa-lewat-program-p3pd>
- Nawawi, J., et al. (2022). Bimbingan teknis peningkatan keterampilan aparatur pemerintah desa di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10(2), 138–145.

- Rosyadi, S., et al. (2008). Problem implementasi kebijakan alokasi dana desa: Studi kasus di Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. *Swara Politika FISIP Unsoed*.
- Rumlus, R., et al. (2017). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Saleh, G. S. (2022). Pengaruh pemberdayaan aparatur terhadap efektivitas pelayanan publik pada kantor desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 298–306.
- Satoto, S., et al. (2024). Revitalization of village-owned enterprises to strengthen the community economy in Indonesia: Between policy and prosperity. *Jambe Law Journal*, 7(2), 509. <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.364>
- Syafingi, H. M., et al. (2018). Paradigma aparatur desa dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139–149.
- Suyanto, S., & Pudjianto, B. (2015). Pemberdayaan masyarakat menuju desa sejahtera (Studi kasus di Kabupaten Sragen). *Sosio Konsepsia*, 5(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v5i1.164>